



# RENCANA KERJA TAHUN 2018

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
BAPPELITBANGDA – KABUPATEN PURBALINGGA  
Tahun 2017

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Bappeda merupakan implementasi Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana kerja yang selanjutnya disebut Renja SKPD yang penyusunannya mengacu dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat serta untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbanda) Tahun 2018 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berangkat dari ketentuan-ketentuan yang ada, Bappelitbanda Kabupaten Purbaingga sebagai salah satu lembaga teknis instansi Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dituntut untuk mempunyai rencana kerja SKPD.

### 1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga;
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2008 tentang Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja OPD adalah untuk memberikan panduan dalam melakukan perencanaan pembangunan sehingga sesuai dengan arah kebijakan yang telah digariskan dengan melihat prioritas kegiatan dan kemampuan anggaran.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja OPD Tahun 2018 adalah :

#### BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

#### BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- D. Review Rancangan awal RKPD
- E. Usulan Program / Kegiatan Masyarakat

#### BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

C. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP



## BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra BAPPEDA

Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

#### 2.1.1. Kinerja Sasaran

Hingga akhir tahun 2016, BAPPEDA telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

##### 1. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan,

Dalam mencapai tujuan tersebut pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Purbalingga menduduki peringkat ke 14 dalam penilaian pangripta abripraya dari target Renstra 2016 - 2021 menjadi nominator anugrah abipraya (10 besar).

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya kapasitas perencanaan daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	100 persen ditindaklanjuti	100 persen ditindaklanjuti	100 persen
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik (79,68)	100 persen
Terwujudnya Keselarasan pembangunan daerah	Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran	40 persen	25 persen	62,50 persen
	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100 persen	92/98 (96 persen)	96 persen
	Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	Sesuai	Blm tersedia	Blm tersedia
	Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD	100 persen		
	Tingkat Pencapaian Target Kinerja sasaran	100 %		

	Pembangunan			
--	-------------	--	--	--

2. Tujuan : Penguatan kelembagaan inovasi daerah

Dalam mencapai tujuan tersebut pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Purbalingga menempatkan inovatornya menjadi juara harapan dan sekaligus menjadi juara favorit yakni inovasi berupa **Teleskop Batu Akik** pada ajang krenova tingkat provinsi Jawa Tengah.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya kapasitas penelitian dan pengembangan iptek daerah	Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan	2 dok	2 dok (SIDA dan Kajian Perceraian)	100 persen
	Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga iptek	6 mitra	6 mitra (Unsoed, UMP, Poltekkes Jakarta, UGM, Ibaraki University, Balitbangprov Jateng)	100 persen

3. Tujuan : Tersedianya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya kapasitas dan kualitas data dan informasi daerah	Jumlah SKPD yang telah mengintegrasikan data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah	27 SKPD	27 SKPD	100 persen
	Tingkat Keterisian Data dalam SIPD	8 kelompok data	8 kelompok data (1.465 elemen data terisi dari 2.221 eldat wajib terisi (69,7 %))	84,79 persen

	Cakupan ketersediaan data dasar dan Informasi pembangunan	4 buku (Profil Purbalingg, PDRB, IHK dan NTP)	4 buku (Profil Purbalingga, PDRB, IHK dan NTP)	100 persen
--	---	---	--	------------

4. Tujuan : Terwujudnya penataan ruang yang berkualitas

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pendayadunaan lahan dan ruang serta mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Cakupan rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan (persen)	100 persen terlayani	Semua terlayani (155 permohonan informasi tata ruang) 104 rekomendasi (68 sesuai 36 tidak sesuai) dan 51 permohonan informasi	100 persen

### 2.1.1. Kinerja Program Dan Kegiatan

#### 1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

##### a. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran

- 1) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga
- 2) Hasil Kegiatan adalah terpenuhinya honor-honor kegiatan, uang lembur, alat tulis kantor, alat-lata listrik, peranko dan materai, peralatan kebersihan, gas, umbul-umbul, telepon, listrik, air, surat kabar, internet, barang cetak, fotocopy dan makan minum
- 3) Sasarannya sebagai penunjang dalam pemenuhan prasarana yang dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan rutin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga
- 4) Anggaran kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran ini sebesar Rp433.704.000,-realisasinya sebesar Rp 414.417.859,- atau 95,55 %.
- 5) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
- 6) Upaya Pemecahan Masalah: tidak ada.

##### b. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi



- 1) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi baik yang ada di dalam daerah maupun yang ada di luar daerah
  - 2) Hasil kegiatan yaitu terpenuhinya rapat - rapat dan konsultasi yang ada di dalam daerah serta rapat - rapat dan konsultasi yang ada di luar daerah, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik.
  - 3) Sasarannya yaitu semua aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga, baik yang mengadakan perjalanan di dalam daerah maupun yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah
  - 4) Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 299.685.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 299.685.000,- atau 100,00 %.
  - 5) Permasalahan yang dihadapi : banyaknya undangan tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia
  - 6) Solusi yang ditempuh kedepan adalah dengan melakukan efisiensi anggaran.
- c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 1) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan.
  - 2) Hasil kegiatan yaitu terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sehingga dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran tugas sehari-hari.
  - 3) Sasarannya adalah terpeliharanya sarana prasarana kantor yang perlu diperbaiki/dipelihara sehingga manfaatnya dapat lebih dioptimalkan.
  - 4) Anggaran kegiatan ini sebesar Rp349.912.000,- dan realisasinya sebesar Rp 289.300.125,- atau 82,68 %.
  - 5) Permasalahan yang dihadapi yaitu banyaknya kendaraan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) yang sudah lama masa pakainya dan masih tingginya biaya pemeliharaan hardware dan software komputer karena terbatasnya tenaga teknis informasi ( IT )
  - 6) Solusi yang ditempuh adalah perlu peremajaan kendaraan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) dan penempatan tenaga teknis informasi (IT) yang memadai untuk menekan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 1) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
  - 2) Hasil Kegiatan adalah Hasil kegiatan terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan kebutuhan maupun spesifikasinya, adapun aset yang dipelihara pada Bappeda Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :
    - a) Sepeda Motor 5 buah
    - b) Rak Arsip 4 buah
    - c) Filling Kabinet 4 buah



- 6) Upaya Pemecahan Masalah : koordinasi secara terus menerus dengan seluruh SKPD.

## 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 9 kegiatan meliputi:

### a. Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2016

- 1) Maksud dari kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2016 adalah mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan mendapatkan masukan rancangan awal RKPD tahun 2017.
- 2) Hasil kegiatan terlaksananya diskusi pembangunan yang dihadiri 320 peserta dari komisi-komisi DPRD, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, dan para Kepala SKPD, para Camat, kasi ekbang dan delegasi kecamatan, perguruan tinggi, instansi vertikal, perbankan, bumd, Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, asosiasi usaha dan LSM, paguyuban kepala desa (Wirapraja) dan forum komunikasi perangkat desa (FK Persada), pemangku kepentingan lainnya. Terlaksananya 4 forum diskusi kelompok yaitu bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial, bidang ekonomi, bidang lingkungan hidup dan infrastruktur wilayah, bidang pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Terserapnya aspirasi masyarakat sebanyak 1132 usulan kegiatan atau sebesar Rp 422.153.053.000,-
- 3) Sasaran kegiatan adalah terselenggaranya forum musyawarah perencanaan pembangunan yang transparan, demokratis dan akuntabel.
- 4) Anggaran jumlah anggaran Rp 62.770.000,- Realisasi Rp 58.342.617,- atau 92,95 %.
- 5) Permasalahan : masih rendahnya usulan untuk kegiatan peningkatan sumberdaya manusia sebesar 13 persen (pendidikan dan kesehatan) dan masih didominasi oleh usulan infrastruktur yakni sebesar 54 %.
- 6) Solusi : sosialisasi pentingnya pembangunan kesehatan dan pendidikan dilingkungan masyarakat.
- 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2017 dalam keadaan baik.
- 8) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada

### b. Penyusunan RKPD Tahun 2017

- 1) Maksud dari kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah
  - a) Pedoman bagi SKPD Kabupaten Purbalingga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2017;
  - b) Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017;
  - c) Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017;

- d) Menciptakan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, serta mewujudkan keterpaduan pembangunan antarwilayah dan antar urusan guna meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
- 2) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.
- 3) Hasil kegiatan adalah tersusunnya 300 buku RKPD Musrenbangkab Tahun 2016, 200 buku rancangan teknokratis awal RKPD tahun 2017, 100 buku Rancangan Akhir RKPD Tahun 2017.
- 4) Sasarannya adalah semua SKPD, semua dinas, instansi, kantor, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga.
- 5) Anggaran sebesar Rp.140.000.000,- realisasi Rp 135.635.290 (96,88 %)
- 6) Permasalahan tidak ada.
- 7) Solusi tidak ada.
- 8) Kondisisaranadanprasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2016 dalam keadaan baik.
- 9) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- c. Penyusunan KUA PPAS Tahun 2017
  - 1) Maksud dari kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & PPAS Tahun 2017 adalah
    - a) Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2017;
    - b) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    - c) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
    - d) Menjalinkan komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam rangka penyusunan APBD
  - 2) Hasil kegiatan adalah tersusunnya 80 buku KUA Tahun 2017, 80 buku PPAS Tahun 2017.
  - 3) Sasarannya adalah adalah semua SKPD, semua dinas, instansi, kantor, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga.
  - 4) Anggaran sebesar Rp.100.554.000,- realisasi Rp. 98.096.012,- ( 97,56%)
  - 5) Permasalahan terbitnya undang-undang baru tentang pemerintahan daerah utamanya yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
  - 6) Solusi konsultasi ke pemerintah pusat dan provinsi.
  - 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2016 dalam keadaan baik.
  - 8) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.

d. Penyusunan RPJMD 2016 – 2021

- 1) Maksud kegiatan adalah (1) melaksanakan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah : (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. (2) RPJMD 2016-2021 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan daerah, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat SKPD; (4) RPJMD juga digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RPJMD akan menjadi acuan bagi masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

- 2) Sasaran kegiatan : DPRD, Seluruh OPD, seluruh komponen masyarakat dan *stakeholders* terkait.
- 3) Hasil kegiatan : Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Rencana Program Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021.
- 4) Anggaran sebesar Rp. 281.000.000 dengan realisasi anggaran : Rp. 259.965.056,- atau 92,51 persen.
- 5) Permasalahan yang dihadapi : Terbitnya peraturan/regulasi baru berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan yang berimplikasi kepada harus disesuaikan prosedur, tata cara serta substansi RPJMD, yang membutuhkan pemahaman dan persepsi yang sama diantara segenap penyusun.
- 6) Solusi yang ditempuh : Melaksanakan Bimbingan teknis, konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya kementerian dalam negeri, Kementerian PAN-RB, Bappeda Provinsi, dll) serta saling komunikasi dengan kabupaten/Kota lain.
- 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
- 8) Hal-hal yang perlu dilaporkan : -

e. Penyusunan Pedoman Tatakelola Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan th 2016

- 1) Maksud Penyusunan Pedoman Tatakelola Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Umum Pembangunan Tahunan Daerah adalah memberikan arahan

dalam tataran teknokratik atas pelaksanaan Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbangkab serta dalam penyusunan Renja SKPD.

- 2) Hasil kegiatan adalah (1) Surat Edaran Bupati tentang petunjuk teknis perencanaan pembangunan tahun 2016 untuk penyusunan RKPD tahun 2017; (2) Rancangan Surat Edaran Bupati tentang petunjuk teknis perencanaan pembangunan tahun 2017 untuk penyusunan RKPD tahun 2018
  - 3) Sasarannya yaitu adalah semua SKPD, semua dinas, instansi, kantor, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga.; 4) Anggaran sebesar Rp.15.630.000,- realisas iRp. 12.259.400,- ( 78,44 %)
  - 5) Perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD. 6) Permasalahan yang dihadapi tidak ada 7) Solusi yang ditempuh tidak ada.
  - 8) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2016 dalam keadaan baik.
  - 9) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- f. Penyusunan RKPD Perubahan 2016
- 1) Maksud dari kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan adalah
    - a) Pedoman bagi SKPD Kabupaten Purbalingga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD Tahun 2016;
    - b) Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;
    - c) Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;
    - d) Menciptakan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, serta mewujudkan keterpaduan pembangunan antarwilayah dan antarurusan guna meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
  - 2) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2016.
  - 3) Hasil kegiatan adalah tersusunnya, 80 buku Rancangan Akhir RKPD Perubahan Tahun 2016
  - 4) Sasarannya adalah semua SKPD, semua dinas, instansi, kantor, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga. 5) Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi Rp 82.975.671,- (82,98 %) 6) Permasalahan tidak ada.
  - 7) Solusi tidakada.

- 8) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2016 dalam keadaan baik.
  - 9) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- g. Penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2016
- 1) Maksud dari kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & PPAS Perubahan Tahun 2016 adalah
    - a) Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Perubahan, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2016;
    - b) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    - c) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
    - d) Menjalinkan komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam rangka penyusunan APBD Perubahan
  - 2) Hasil kegiatan adalah tersusunya 80 buku KUA Perubahan Tahun 2016, 80 buku PPAS Perubahan Tahun 2016.
  - 3) Sasarannya adalah adalah semua SKPD, semua dinas, instansi, kantor, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga.
  - 4) Anggaran sebesar Rp.75.000.000,-realisasiRp. 68.816.131,- ( 91,76%)
  - 5) Permasalahan terbitnya undang-undang baru tentang pemerintahan daerah utamanya yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  - 6) Solusi konsultasi ke pemerintah pusat dan provinsi.
  - 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2016 dalam keadaan baik.
  - 8) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- h. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2016-2021
- 1) Maksud dari penyusunan kajian lingkungan hidup strategis adalah (1) Melakukan Kajian tentang dampak lingkungan terhadap dokumen penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021; (2) Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan sudah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purbalingga;
  - 2) Hasil kegiatan adalah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) RPJMD Kabupaten Purbalingga
  - 3) Sasarannya adalah Menilai kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam RPJMD sudah melihat/memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
  - 4) Anggaran sebesar Rp. 114.250.000,- realisasi Rp. 96.555.671,- (84,51 %).
  - 5) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
  - 6) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.



- 7) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- i. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Perencana
  - 1) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya 2 (dua) kali pelaksanaan diklat peningkatan kapasitas dan kompetensi perencana bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga
  - 2) Hasil kegiatan adalah bertambahnya pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur perencana.
  - 3) Sasarannya yaitu semua aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga
  - 4) Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 40.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 39.100.000,- atau 97,75 %.
  - 5) Permasalahan yang dihadapi yaitu keterbatasan anggaran yang disediakan untuk diklat peningkatan kapasitas dan kompetensi perencana.
  - 6) Solusi yang ditempuh adalah ke depan dalam menyusun perencanaan anggaran tahun berikutnya agar menyesuaikan standarisasi dan volumenya.
3. Program Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 15 kegiatan meliputi:

- a. Fasilitasi dan Pelaporan TP, DAK dan Bantuan Gubernur
  - 1) Maksud kegiatan : Fasilitasi dan Pelaporan TP, DAK, dan Ban-Gub dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian kegiatan-kegiatan bersumber dana TP, DAK, dan Ban-Gub
  - 2) Sasaran kegiatan: Seluruh OPD khususnya pengampu kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP) dan Bantuan Gubernur (BanGub) Tahun 2016.
  - 3) Hasil kegiatan: Laporan Triwulan kegiatan DAK, TP, dan Ban-Gub tahun 2016.
  - 4) Anggaran sebesar Rp. 72.500.000 dengan Realisasi anggaran : Rp. 61.445.575,- (Enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 84,75 persen
  - 5) Permasalahan yang dihadapi: Belum semua OPD dapat melaporkan kegiatan secara tepat waktu, sehingga menghambat kelancaran dalam pelaporan ke Provinsi.
  - 6) Solusi yang ditempuh : Meminta/menagih laporan secara intensif sampai pada jemput bola ke masing-masing OPD.
  - 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan: baik
  - 8) Hal-hal yang perlu dilaporkan: -
- b. Fasilitasi FEDEP
  - 1) Maksud Kegiatan: FEDEP adalah memberikan ruang bagi peran serta masyarakat dan kalangan dunia usaha sebagai mitra pemerintah Kabupaten dalam menetapkan kebijakan pengembangan ekonomi lokal. Dan memberikan

fasilitasi kepada pelaku ekonomi lokal khususnya UMKM dengan pendekatan klaster agar bisa meningkatkan kemampuan sumber daya dan meningkatkan daya saing produk daerah

- 2) Hasil Kegiatan: (1) Peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para pelaku UMKM; (2) Adanya koordinasi yang baik antara pokja FPESD (Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya) Provinsi Jawa Tengah dengan FEDEP (*Forum for Economic Development and Employment Promotion*) Kabupaten Purbalingga; (3) Promosi produk unggulan melalui kegiatan pameran.
  - 3) Sasaran kegiatan : (1) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan UMKM; (2) Meningkatnya promosi produk dan potensi ekonomi local; (3) Meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
  - 4) Anggaran sebesar Rp. Rp. 120.000.000,00 dan realisasi anggaran : realisasi kegiatan sebesar 100%, realisasi SPMU sebesar Rp. 112.155.200 ,- (93 %) dan realisasi SPJ sebesar Rp. 112.155.200 ,- (93 %)
  - 5) Permasalahan yang dihadapi : Belum terlaksananya konsultasi publik dokumen LED.
  - 6) Solusi yang ditempuh : Akan dilaksanakan konsultasi publik di Tahun 2017.
  - 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan: Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan ini baik namun masih kurang dalam kuantitas nya.
  - 8) Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak Ada.
- c. Pendampingan Program WISMP
- 1) Maksud Kegiatan: (1) penyediaan Dana pendampingan sebagai salah satu syarat luncuran dana *LOAN* dalam kegiatan WISMP setiap tahunnya. (2) Optimalisasi peran GP3A, IP3A dan P3A dalam PPSIP
  - 2) Hasil Kegiatan : (1) Berjalannya operasi pemeliharaan irigasi dengan PPSIP Pengadaan Kendaraan Operasional kegiatan WISMP (2) Bergabungnya PDAM sebagai anggota GP3A di Daerah Irigasi yang pada Tahun 2016 dilaksanakan program dari PDAM
  - 3) Sasaran Kegiatan: Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/ Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di 6 (enam) Daerah Irigasi Kesepakatan WISMP
  - 4) Anggaran sebesar Rp. 215.000.000,- realisasi Rp. 208.884.886,- 97,16)
  - 5) Permasalahan yang dihadapi: Masih adanya konflik perebutan air
  - 6) Solusi yang ditempuh: Rapat - rapat koordinasi
  - 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan: baik
  - 8) Hal-hal yang perlu dilaporkan : -
  - 9) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
  - 10) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.

d. Evaluasi RKPD Tahun 2016

- 1) Maksud kegiatan: 1. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2015 dengan mendasarkan pada target tahun 2015, sekaligus mengetahui kendala yang dijumpai dalam pencapaian target, sehingga dapat ditentukan prioritas pembangunan pada tahun mendatang; 2. Menyediakan dokumen evaluasi perencanaan pembangunan sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan RKPD Perubahan dan RKPD tahun depan;
  - 2) Sasaran kegiatan : Seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) kabupaten Purbalingga
  - 3) Hasil kegiatan: Tersedianya hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 dan
  - 4) Anggaran sebesar Rp. 81.950.000,- dan Realisasi anggaran : Rp. 77.338.050,- (Tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah) atau 94.37 persen.
  - 5) Permasalahan yang dihadapi : Masih relatif rendahnya kesadaran beberapa OPD terkait pentingnya data dan informasi yang akurat sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menghambat kelancaran pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
  - 6) Solusi yang ditempuh: Sosialisasi dan Rapat-rapat koordinasi secara berkala tentang kewajiban OPD dalam evaluasi Rencana Kerja masing-masing.
  - 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan: Baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
  - 8) Hal-hal yang perlu dilaporkan: -
- e. Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata 1) Maksud kegiatan :
- a) Bahwa salah satu upaya guna akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga antara lain dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi. Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pendayagunaan potensi wilayah Kabupaten Purbalingga.
  - b) Menerapkan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
  - c) Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan potensi wilayah Kabupaten Purbalingga
  - d) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - e) Memberikan fasilitasi bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di wilayah Kabupaten Purbalingga
- 2) Sasaran kegiatan :
- a) Mahasiswa dari perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja

Nyata di Kabupaten Purbalingga

- b) OPD yang mempunyai program dan kegiatan yang dapat disinergikan dengan program dan kegiatan mahasiswa Kuliah kerja Nyata.
  - c) Para camat, kepala desa, dan masyarakat desa/ kelurahan yang menjadi tuan rumah kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- 3) Hasil kegiatan :
- a) Terfasilitasinya mahasiswa dari 6 (enam) perguruan tinggi dan 833 mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Purbalingga.
  - b) Terlaksananya / teracarakannya kegiatan penerimaan, penarikan, dan ekspo / pameran hasil kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
  - c) Terdatanya permasalahan riil dalam masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi masyarakat lengkap dengan narasi dan dokumentasi visual (gambar)
  - d) Terdatanya berbagai usulan program yang tepat untuk diterapkan di lingkungan masyarakat melalui KKN
  - e) Tersusunya laporan kegiatan KKN tahun 2016
- 4) Anggaran sebesar Rp. 171.000.000 dengan Realisasi anggaran : Rp. 159.050.513,- (seratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu lima ratus tiga belas rupiah). atau 93,01 persen
- 5) Permasalahan yang dihadapi :
- a) Dalam beberapa kesempatan ditemukan bahwa program kerja mahasiswa KKN tidak melalui observasi langsung dimasyarakat, sehingga kurang aplikatif dan kurang tepat aplikasinya dimasyarakat.
  - b) Kurangnya adaptasi dalam masyarakat, personality mahasiswa yang kurang baik, dan ketidakaktifan mahasiswa juga masih ditemui sehingga berpengaruh pada optimalisasi program kerja
  - c) Adanya program kerja dalam SKPD yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa KKN akan tetapi belum dimanfaatkan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi
  - d) Cukup pendeknya jangka waktu KKN sehingga program kerja yang dilaksanakan kurang optimal.
- 6) Solusi yang ditempuh :
- a) Membekali mahasiswa dalam penguasaan wilayah dan pembekalan untuk memberikan resep praktis dalam pendekatan sosial sehingga melancarkan pelaksanaan program KKN
  - b) Optimalisasi, intensifikasi dan diversifikasi program kerja mahasiswa KKN disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga menjadikan KKN sebagai program penting bagi masyarakat
  - c) Optimalisasi koordinasi dengan OPD SKPD terkait guna optimalisasi program kerja KKN di wilayah.
- 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan:

Baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan

8) Hal-hal yang perlu dilaporkan: -

f. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Bangub) 1)

Maksud kegiatan :

- a) Penyelenggaran koordinasi dan konsolidasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.
- b) Memperkuat dan mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga.
- c) Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga
- d) Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.
- e) Merumuskan kesepakatan, kebijakan dan rekomendasi dalam upaya meningkatkan efektifitas program penanggulangan, pengurangan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dari berbagai *stakeholder*.

2) Sasaran kegiatan :

- a) OPD yang mengampu program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
- b) Organisasi masyarakat yang mempunyai program penanggulangan kemiskinan
- c) BUMD Kabupaten Purbalingga
- d) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se Kabupaten Purbalingga 3)

Hasil kegiatan :

- a) Laporan hasil kegiatan koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga
- b) Inventarisasi berbagai permasalahan dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
- c) Hasil pelaksanaan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga
- d) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

4) Realisasi anggaran: Rp. 129.276.605,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima rupiah ) atau 57.95 persen 5)

Permasalahan yang dihadapi :

- a) Relatif rendahnya capaian kinerja keuangan disebabkan karena belanja jasa pembuatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kemiskinan yang telah dianggarkan tidak dicairkan karena berdasarkan hasil rapat koordinasi

TKPK Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2016 di Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan tanggal 1 Desember 2016 disampaikan bahwa Provinsi Jawa Tengah melalui TKPK sedang membuat SIM Penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan on line dengan 35 kabupaten/ kota. Namun sampai dengan akhir Desember 2016 kami konfirmasi ternyata SIM dimaksud belum siap didistribusikan kepada kabupaten/ kota.

- b) Perlunya penguatan kelembagaan dan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan melalui penguatan TKPK Kabupaten Purbalingga.
  - c) Belum semua OPD menggunakan single data dalam penentuan sasaran/ targetting program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- 6) Solusi yang ditempuh :
- a) Perlu ada kajian pembentukan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan guna mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan pada seluruh OPD.
  - b) Dalam rangka akurasi penentuan sasaran / targetting perlu dilakukan data tunggal dan tersosialisasikan kepada seluruh OPD yang mengampu program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan:  
Baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
- 8) Hal-hal yang perlu dilaporkan: -
- g. Monitoring dan Evaluasi Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil
- 1) Maksud Kegiatan :
- a) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (objek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (*input*), serta pencapaian keluaran (*output*) kegiatan;
  - b) Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan yang meliputi hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) kegiatan tersebut;
  - c) Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan / program pembangunan Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil.
  - d) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan akhir.
- 2) Sasaran kegiatan :
- a) Program dan kegiatan Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil di Kabupaten Purbalingga, dan semua SKPD yang

berada di lingkup bidang Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- b) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil.
  - c) Tercapainya peningkatan kapasitas kinerja pelaksanaan pembangunan di Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil di kabupaten Purbalingga.
- 3) Hasil kegiatan :
- a) Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan Bidang Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (objek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (*input*), serta pencapaian keluaran (*output*) kegiatan;
  - b) Dengan terpantau dan terinventarisirnya permasalahan-permasalahan pembangunan pada Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil, akan memudahkan dalam melakukan evaluasi kebijakan dan program pembangunan bidang Pemerintahan dan Kesra yang meliputi hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) kegiatan pembangunan.
- 4) Anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- realisasi Rp. 24,134.000,- (96,54 %).
- 5) Permasalahan yang dihadapi :
- a) Tidak semua kegiatan pembangunan di setiap SKPD terkait Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil termonev semuanya;
  - b) Perlu melibatkan SKPD lingkup kegiatan di bidang Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil sebagai anggota tim Monev.
- 6) Solusi yang ditempuh :
- a) Dibuat jadwal monitoring dan evaluasi yang lebih terarah dan terkontrol sehingga monev kelapangan dilakukan lebih maksimal lagi;
  - b) Perlu dukungan SKPD lingkup bidang Bidang Energi, Sumberdaya mineral, lingkungan Hidup dan Praswil.
- 7) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : -
- h. Pendampingan Program-program Pemberdayaan Masyarakat
- a. Maksud Kegiatan : Terlaksananya pendampingan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diantaranya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang merupakan kelanjutan dari Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) yang juga merupakan kelanjutan dari Program PNPM Perkotaan serta pendampingan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) di 44 Kelurahan/Desa pada 3 Kecamatan yaitu Purbalingga, Padamara dan Kalimanah sebagai pelaksana program kegiatan pembangunan sanitasi (USRI).
  - b. Hasil Kegiatan: Hasil kegiatan berupa dokumen laporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur penanganan kawasan kumuh perkotaan di 5



- kelurahan prioritas dan baseline dokumen perencanaan pencegahan dan penanganan kumuh di 44 Kelurahan/Desa sebagai pelaksana program dan kegiatan pencegahan dan penanganan permukiman kumuh (RPLP)
- c. Sasaran Kegiatan: Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) hasil bentukan BKM di 44 Kelurahan/Desa pada 3 Kecamatan yaitu: Purbalingga, Padamara dan Kalimanah
  - d. Anggaran sebesar Rp. 60.000.000.- dengan realisasi Anggaran Rp. 58.832.595,- (Lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sebesar 98% (Sembilan puluh delapan persen).
  - e. Permasalahan yang dihadapi: Keterbatasan data-data teknis yang dimiliki serta belum adanya Pokja yang khusus menangani permasalahan perumahan dan permukiman serta pembangunan sanitasi di Purbalingga.
  - f. Solusi yang ditempuh: Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lintas SKPD dan juga terhadap stakeholders lainnya terutama peran masyarakat dan keterlibatan akademisi serta pihak swasta.
  - g. Kondisi sarana dan prasarana: Sangat baik dan mendukung terlaksananya kegiatanyang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan
  - h. Hal-hal yang perlu dilaporkan: Tidak ada
  - i. Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
    - a. Maksud kegiatan :
      - (1) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (objek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (input), serta pencapaian keluaran (*output*) kegiatan;
      - (2) Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan yang meliputi hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) kegiatan tersebut;
      - (3) Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan / program pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
      - (4) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan akhir.
    - b. Sasaran kegiatan :
      - (1) Program dan kegiatan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Purbalingga, dan semua SKPD yang berada di lingkup bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain:
      - (2) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
      - (3) Tercapainya peningkatan kapasitas kinerja pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Purbalingga.
    - c. Hasil kegiatan :

- (1) Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (objek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (*input*), serta pencapaian keluaran (*output*) kegiatan;
  - (2) Dengan terpantau dan terinventarisirnya permasalahan-permasalahan pembangunan pada bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, akan memudahkan dalam melakukan evaluasi kebijakan dan program pembangunan bidang Pemerintahan dan Kesra yang meliputi hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) kegiatan pembangunan.
- d. Anggaran: Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Realisasi anggaran: Rp. 61.352.217,00 (enam puluh satu juta rupiah tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
- e. Permasalahan yang dihadapi :
- (1) Tidak semua kegiatan pembangunan di setiap SKPD terkait bidang Pemerintahan dan Kesra termonev semuanya;
  - (2) Perlu melibatkan SKPD lingkup kegiatan di bidang Pemerintahan dan Kesra sebagai anggota tim Monev.
- f. Solusi yang ditempuh :
- (1) Dibuat jadwal monitoring dan evaluasi yang lebih terarah dan terkontrol sehingga monev kelapangan dilakukan lebih maksimal lagi;
  - (2) Perlu dukungan SKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Kesra.
- g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : -
- h. Hal-hal yang perlu dilaporkan : -
- j. Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi
- a. Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu:
- (1) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan serta pengidentifikasian akan kemajuan kegiatan pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2016 meliputi ketepatan sasaran (obyek) dan lokasi pelaksanaan kegiatan, tingkat efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (*input*), pencapaian keluaran dari kegiatan tersebut (*output*).
  - (2) Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan/program pembangunan di bidang ekonomi dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut yang meliputi terhadap hasil (*outcome*) dan sisi manfaat (*benefit*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
  - (3) Menilai aspek kesesuaian antara proses pelaksanaan dengan rencana kegiatan yang telah dilakukan.
  - (4) Mendapatkan data-data dan fakta sebagai *inform decision* guna menetapkan tindak lanjut atau intervensi yang diperlukan oleh semua pelaku pembangunan bidang ekonomi yang berkepentingan untuk kemudian dibuatkan dalam laporan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan monev tersebut serta menyusun laporan akhir.

- b. Hasil kegiatan adalah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Ekonomi Tahun 2016 yang berisi hasil Focus Group Discussion (FGD) sektor Pariwisata dan Pertanian serta dokumentasi dan masukan hasil dari kunjungan ke lapangan
  - c. Sasarannya adalah program dan kegiatan dalam pembangunan di rumpun bidang ekonomi diantaranya sektor pertanian dalam arti luas, perikanan, UMKM, pariwisata, perdagangan, perindustrian, jasa dan keuangan, desa berdikari serta ketenaga kerjaan.
  - d. Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 46.179.100,- (Empat puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah) atau sebesar 92,36% (Sembilan puluh dua koma tiga puluh enam persen).
  - e. Perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, RKPD Tahun 2016, Renja BAPPEDA Tahun 2016 dan APBD Tahun 2016.
  - f. Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah dikarenakan luasnya lingkup kegiatan pembangunan di bidang ekonomi yang akan di monev serta keterbatasan waktu dan personel yang ada, sehingga tidak semuanya program dan kegiatan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi.
  - g. Solusi yang ditempuh antara lain dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lintas SKPD dalam rumpun bidang ekonomi serta menyusun schedule yang bisa terintegrasi dengan kegiatan yang ada di SKPD rumpun bidang ekonomi agar dapat mengefektifkan kegiatan dan personel serta mengefesiensikan dari sisi waktu pelaksanaan.
  - h. Kondisi sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud sangat baik dan mendukung terlaksananya program dan kegiatan monitoring dan evaluasi bidang ekonomi
- k. *Fasilitasi Green Economy and Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia (GELAMA-I)*
- a. Maksud Kegiatan: Melakukan inventarisasi penyebab emisi dan sektor penyumbang emisi terbesar di Purbalingga sebagai dukungan pembangunan rendah emisi dan ekonomi hijau untuk sektor berbasis lahan di Kabupaten Purbalingga dengan tujuan memberikan rekomendasi, intervensi dan referensi perencanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga yang mendukung penurunan emisi serta meningkatkan nilai ekonomis yang tetap mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
  - b. Hasil Kegiatan: Dokumen Low Emission Development ( LED ) Kabupaten Purbalingga.

- c. Sasaran kegiatan: Aksi mitigasi pembagunan rendah emisi ini menysasar pada sektor berbasis lahan ( Kehutanan ,Pertanian dan Alih fungsi lahan ).
- d. Anggaran sebesar Rp. 135.800.000,00 dan realisasi anggaran sebesar 119.624.538,- (88 %).
- e. Permasalahan yang dihadapi: Belum terlaksananya konsultasi publik dokumen LED.
- f. Solusi yang ditempuh : Akan dilaksanakan konsultasi publik di Tahun 2017.
- g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan: Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan ini baik namun masih kurang dalam kuantitas nya.
- h. Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak Ada.
- l.

#### WISMP

- a. Maksud Kegiatan : Optimalisasi peran GP3A, IP3A dan P3A
- b. Hasil Kegiatan : 1. Berjalannya operasi pemeliharaan irigasi dengan PPSIP; 2. Terselenggaranya Revitalisasi Kepengurusan Kelembagaan Komisi Irigasi; 3 . Bergabungnya PDAM sebagai anggota GP3A di Daerah Irigasi yang pada Tahun 2016 dilaksanakan program dari PDAM; 4. Tersedianya dokumen laporan kegiatan Masing-masing TPM di Daerah Irigasinya; 5. Tersedianya dokumen laporan triwulan KTPM
- c. Sasaran Kegiatan : Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/ Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di 6 (enam) Daerah Irigasi Kesepakatan WISMP
- d. Anggaran sebesar Rp. 223.543000,- realisasi Rp. 197.867.702,- (88,51 %)
- e. Permasalahan yang dihadapi : -
- f. Solusi yang ditempuh : -
- g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : -
- h. Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tahun 2016 telah dilaksanakan Revitalisasi Kepengurusan Kelembagaan Komisi Irigasi (KOMIR) tetapi belum dikukuhkan/dilantik sehingga tahun 2017 diharapkan segera di lakukan pengukuhan pengurus KOMIR baru
- m. Pendampingan Program Nasional Bidang Keciptakarya
  - a) Maksud Kegiatan : Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bidang keciptakarya (air minum, sanitasi, perumahan dan kawasan permukiman, dan persampahan).
  - b) Hasil Kegiatan : Terkoordinasinya pelaksanaan 5 Program Bidang Keciptakarya

- c) Sasaran Kegiatan : Koordinasi pelaksanaan program dan terfasilitasinya usulan program bidang keciptakaryaan
- d) Anggaran sebesar Rp. 74.180.000,00 dengan realisasi Anggaran: Rp. 50.146.490,00
- e) Permasalahan yang dihadapi : -
- f) Solusi yang ditempuh : -
- g) Kondisi sarana dan prasarana yang Digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : -
- h) Hal-hal yang perlu dilaporkan : -
- n. Pendidikan Untuk Semua (Bangub)
  - a) Maksud kegiatan :
    - (1) Terlaksananya fasilitasi program PUS di Kabupaten Purbalingga
    - (2) Meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang pentingnya pelaksanaan Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Kabupaten Purbalingga
    - (3) Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan kinerja Forum Pendidikan untuk Semua (PUS) sebagai wadah koordinasi antar *stakeholder*.
    - (4) Mengkoordinasikan kebijakan dan pengendalian program Pendidikan Untuk Semua di Kabupaten Purbalingga.
    - (5) Mengidentifikasi dan dan memetakan permasalahan bidang pendidikan di Kabupaten Purbalingga
    - (6) Sebagai bentuk fasilitasi dan upaya sistematis, terarah, dan terpadu dengan mengintegrasikan dan mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Untuk Semua.
    - (7) Memberikan rekomendasi atas hasil identifikasi dan pemetaan permasalahan dalam pelaksanaan program Pendidikan Untuk Semua (PUS) dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan
    - (8) Diperolehnya sinkronisasi, harmonisasi dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program PUS sebagai salah satu program penting di bidang pendidikan.
  - b) Sasaran kegiatan :
    - (1) OPD yang mengampu program dan kegiatan bidang pendidikan
    - (2) BPS dan Kantor Kementerian Agama
    - (3) UPT Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan
    - (4) K3S SD dan MKKS SMP, SMA, dan SMK
    - (5) Kwarcab Gerakan Pramuka Pramuka
    - (6) Para Pengawas dan Penilik Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama
    - (7) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se Kabupaten Purbalingga
  - c) Hasil kegiatan :

- (1) Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang pendidikan yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (objek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (*input*), serta pencapaian keluaran (*output*) kegiatan
  - (2) Dengan terpantau dan terinventarisirnya permasalahan-permasalahan pembangunan pada bidang pendidikan, maka akan memudahkan dalam melakukan evaluasi kebijakan dan program pembangunan bidang pendidikan yang meliputi hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) kegiatan pembangunan.
  - (3) Terlaksananya fasilitasi program PUS di Kabupaten Purbalingga
  - (4) Teridentifikasi dan dan terpetakan permasalahan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Purbalingga
  - (5) Terfasilitasinya upaya yang sistematis, terarah, dan terpadu dengan mengintegrasikan dan mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Untuk Semua.
  - (6) Diperolehnya rekomendasi atas hasil identifikasi dan pemetaan permasalahan dalam pelaksanaan program Pendidikan Untuk Semua (PUS) dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan
  - (7) Diperolehnya sinkronisasi, harmonisasi dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program PUS sebagai salah satu program penting di bidang pendidikan.
  - (8) Terlaksananya Rapat Koordinasi PUS
  - (9) Terlaksananya Workshop PUS
  - (10) Tersusunnya laporan akhir Pendidikan Untuk Semua.
- d) Anggaran sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Dan realisasi anggaran : Rp. 39.779.600 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) atau 61.20 persen
- e) Permasalahan yang dihadapi :
- (1) Relatif rendahnya capaian keuangan karena adanya pertimbangan efisiensi anggaran ketika ada informasi penundaan transfer DAU dari pusat, sehingga kegiatan penyusunan laporan PUS yang telah dianggarkan dan sedianya dilakukan dengan teknis konsinering dan dilaksanakan di luar kantor, dalam realisasinya dilakukan di dalam kantor, sehingga jasa akomodasi dan sewa gedung/ kantor tidak direalisasikan.
  - (2) Tidak semua kegiatan pembangunan pendidikan yang terdapat dalam OPD terpantau dan termonev semuanya;
  - (3) Perlunya koordinasi yang lebih intensif dan upaya lebih optimal guna peningkatan capaian kinerja pembangunan bidang pendidikan

- (4) Perlu penguatan kelembagaan Pendidikan untuk Semua baik kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua maupun Sekretariat Forum Pendidikan untuk Semua.
  - (5) Perlunya penyediaan data yang valid dan akurat dalam rangka penghitungan capaian target kinerja Pendidikan Untuk Semua..
  - f) Solusi yang ditempuh :
    - (1) Perlunya penguatan kelembagaan PUS
    - (2) Kegiatan sebaiknya dimulai pada awal tahun anggaran.
  - g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan :  
Baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
  - h) Hal-hal yang perlu dilaporkan : -
- o. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) (Bangub)
- a) Maksud kegiatan :
    - (1) Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat kekurangan yodium
    - (2) Pengendalian peredaran garam konsumsi
    - (3) Pemantauan dan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan kandungan yodium secara berkala terhadap garam konsumsi yang beredar
    - (4) Pembinaan kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan, sosialisasi dan penyebaran informasi hasil pemeriksaan kandungan yodium garam konsumsi yang beredar di masyarakat.
  - b) Sasaran kegiatan :
    - (1) Pedagang garam pada pasar tradisional
    - (2) OPD yang mengampu kegiatan pencegahan dan penangguloangan penyakit akibat kekurangan yodium, sosialisasi program pemerintah, dan OPD yang menangani penegakan regulasi
    - (3) Aparatur pemerintah daerah.
  - c) Hasil kegiatan :
    - (1) Tersedianya alat titrasi iodometri test sebanyak 2 (dua) unit.
    - (2) Terambilnya sampel, terukurnya sampel, dan tersosialisasikannya hasil pemeriksaan sampel garam pada 13 pasar tradisional di Kabupaten Purbalingga
    - (3) Terlaksananya pembinaan dan pemberian teguran bagi pedagang yang menjual garam konsumsi yang tidak mengandung yodium
    - (4) Terlaksananya rapat koordinasi Pencegahan dan penanggulangan GAKY
  - d) Anggaran sebesar Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) dengan Realisasi anggaran : Rp. 47.315.571,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 94.63 persen
  - e) Permasalahan yang dihadapi :



- (1) Alat test garam yang tersedia kurang banyak sehingga sampel yang diperiksa menjadi terbatas.
- (2) Perlunya pemeriksaan dan pemantauan secara periodik, minimal 3 kali dalam setahun sehingga dapat diperoleh data yang relatif akurat.
- f) Solusi yang ditempuh :
  - (1) Perlunya pengadaan alat dan refill titrasi kit pada tahun anggaran mendatang
  - (2) Penambahan intensitas pemeriksaan dan pemantauan pada tahun mendatang.
- g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan :  
Baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
- h) Hal-hal yang perlu dilaporkan : -

#### 4. Program Penelitian dan Pengkajian Daerah

Program Penelitian dan Pengkajian Daerah terdiri dari 2 kegiatan meliputi

##### 1) Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan

- a) Maksud Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi ijin penelitian, kajian / penelitian, diseminasi hasil litbang, lomba krenova dan pameran hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Kab. Purbalingga;
- b) Hasil Kegiatan : Hasil kegiatan berupa terbitnya surat ijin penelitian sebanyak 595 surat; kajian sosial “Profil Perceraian Kabupaten Purbalingga Tahun 2015; Diseminasi “Ketahanan Keluarga”; Lomba Krenova Tingkat Kab. Purbalingga; Mengikuti Lomba Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah; Mengikuti pameran Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Solo.
- c) Sasaran Kegiatan : Para inventor, Akademisi, Instansi pemerintahan, Swasta dan Masyarakat.
- d) Anggaran sebesar Rp. 150.000.000.- dan Realisasi Anggaran Rp. 148.359.150,- (Seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) atau sebesar 98,9 persen.
- e) Permasalahan yang dihadapi : Masih rendahnya kualitas SDM dan motivasi dibidang penelitian dan pengembangan, masih rendahnya penerapan hasil ristek karena kurangnya informasi kemasyarakat tentang hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang ada.
- f) Solusi yang ditempuh : Peningkatan motivasi dan kapasitas SDM litbang dengan melakukan kajian/penelitian dan mengadakan lomba krenova tingkat Kabupaten, mengikutsertakan para inventor/peneliti dalam lomba krenova tingkat Provinsi Jawa Tengah; serta mensosialisasikan/diseminasi hasil litbang dan mengikuti ajang pameran sebagai upaya untuk pengembangan dan peningkatan penerapan hasil ristek; Meningkatkan koordinasi dan komunikasi stakeholders terutama peran masyarakat dan keterlibatan akademisi serta pihak swasta.

- g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Baik, hanya saja tidak memiliki SDM litbang;
- h) Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak ada

## 2) Penyusunan Sistem Inovasi Daerah

### a) Maksud Kegiatan :

(1) Membuat rumusan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam upaya menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar stakeholder (institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah).

(2) Melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546), pasal 3. Bupati/Walikota menetapkan kebijakan penguatan SIDA di Kabupaten/Kota dan pasal 5. Pasal 5 (ayat 2) Kebijakan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam: *Roadmap* penguatan SIDA; RPJMD; dan RKPD.

b) Hasil Kegiatan : Tersusunnya dokumen Roadmap Sistem Inovasi daerah Kab. Purbalingga Tahun 2017-2021.

c) Sasaran Kegiatan : Institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah).

d) Anggaran sebesar Rp. 149.600.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan Realisasi Anggaran Rp. 140.470.675,- (Seratus empat puluh empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 94 persen.

e) Permasalahan yang dihadapi : Belum terintegrasinya penguatan inovasi di Kabupaten Purbalingga dan adanya penataan OPD yang baru sehingga agak menyulitkan ketika membahas fokus program prioritas dan rencana aksi.

f) Solusi yang ditempuh : Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar *stakeholders* dengan membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDa) Kabupaten Purbalingga lewat Keputusan Bupati.

g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Baik.

h) Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak ada

## 3) Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata

### a. Maksud kegiatan :

(1) Bahwa salah satu upaya guna akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga antara lain dilakukan melalui kerja

sama dengan berbagai perguruan tinggi. Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pendayagunaan potensi wilayah Kabupaten Purbalingga.

- (2) Menerapkan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
  - (3) Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan potensi wilayah Kabupaten Purbalingga
  - (4) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - (5) Memberikan fasilitasi bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di wilayah Kabupaten Purbalingga
- b. Sasaran kegiatan :
- (1) Mahasiswa dari perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Purbalingga
  - (2) OPD yang mempunyai program dan kegiatan yang dapat disinergikan dengan program dan kegiatan mahasiswa Kuliah kerja Nyata.
  - (3) Para camat, kepala desa, dan masyarakat desa/ kelurahan yang menjadi tuan rumah kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- c. Hasil kegiatan :
- (1) Terfasilitasinya mahasiswa dari perguruan tinggi yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Purbalingga.
  - (2) Terlaksananya / teracarakannya kegiatan penerimaan, penarikan, dan ekspo / pameran hasil kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
  - (3) Terdatanya permasalahan riil dalam masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi masyarakat lengkap dengan narasi dan dokumentasi visual (gambar)
  - (4) Terdatanya berbagai usulan program yang tepat untuk diterapkan di lingkungan masyarakat melalui KKN
  - (5) Tersusunya laporan kegiatan KKN tahun 2016
- d. Anggaran sebesar Rp. 171.000.000 dengan Realisasi anggaran : Rp. 159.050.513,- (seratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu lima ratus tiga belas rupiah). atau 93,01 persen
- e. Permasalahan yang dihadapi :
- (1) Dalam beberapa kesempatan ditemukan bahwa program kerja mahasiswa KKN tidak melalui observasi langsung dimasyarakat, sehingga kurang aplikatif dan kurang tepat aplikasinya dimasyarakat.
  - (2) Kurangnya adaptasi dalam masyarakat, personality mahasiswa yang kurang baik, dan ketidakaktifan mahasiswa juga masih ditemui sehingga berpengaruh pada optimalisasi program kerja

- (3) Adanya program kerja dalam SKPD yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa KKN akan tetapi belum dimanfaatkan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi
- (4) Cukup pendeknya jangka waktu KKN sehingga program kerja yang dilaksanakan kurang optimal.
- f. Solusi yang ditempuh :
  - (1) Membekali mahasiswa dalam penguasaan wilayah dan pembekalan untuk memberikan resep praktis dalam pendekatan sosial sehingga melancarkan pelaksanaan program KKN
  - (2) Optimalisasi, intensifikasi dan diversifikasi program kerja mahasiswa KKN disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga menjadikan KKN sebagai program penting bagi masyarakat
  - (3) Optimalisasi koordinasi dengan OPD SKPD terkait guna optimalisasi program kerja KKN di wilayah.
- g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan: Baik dan sangat mendukung penyelesaian pekerjaan
- h. Hal-hal yang perlu dilaporkan: -

#### 5. Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah terdiri dari 3 kegiatan meliputi :

- 1) Penyusunan Data dasar dan Informasi Pembangunan Daerah
  - a) Maksud Kegiatan : Terlaksananya ketersediaan data utk Perencanaan Pembangunan & Informasi kepada Dinas/Instansi maupun masyarakat pengguna data
  - b) Hasil Kegiatan : Tersedianya Buku Purbalingga Dalam Angka (PDA); Buku Saku PDA; Kecamatan Dalam Angka (KDA) Tahun 2016; Buku PDRB Kab. Purbalingga Tahun 2015, untuk SKPD dan wilayah Kecamatan; dan Buku Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Ekonomi Kab. Purbalingga Tahun 2015.
  - c) Sasaran Kegiatan : Instansi pemerintahan, Akademisi, Swasta dan Masyarakat.
  - d) Anggaran sebesar Rp. 230.000.000.- Realisasi Anggaran : Rp. 220.870.675,- (Dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 96 persen.
  - e) Permasalahan yang dihadapi : Masih kurang memadainya sumber data dan kemampuan SDM pada OPD/SKPD dalam pengelolaan data dan informasi .
  - f) Solusi yang ditempuh : kerjasama/kolaborasi dengan BPS selaku narasumber penyediaan data statistik.
  - g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Baik

- h) Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak ada
- 2) Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah/SIPD (Bangub)
- a) Maksud Kegiatan : Terlaksananya ketersediaan Data utk Perencanaan Pembangunan & Informasi kpd Dinas/Instansi maupun masyarakat pengguna Data
  - b) Hasil Kegiatan : Tersedianya 80 Buku SIPD kabupaten Purbalingga Tahun 2015 dan 78 Buku SIPD Kecamatan Tahun 2016
  - c) Sasaran Kegiatan : Instansi pemerintahan, Akademisi, Swasta dan Masyarakat.
  - d) Anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan realisasi Anggaran sebesar Rp. 72.829.750,- (Tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 97 persen
  - e) Permasalahan yang dihadapi : Terbatasnya sumber data yang dimiliki oleh SKPD/ instansi tingkat Kabupaten, masih adanya inkonsistensi dan kesalahan dalam pengisian data oleh SKPD, kurangnya kesadaran akan pentingnya data, sarana dan prasarana penyediaan data dan informasi yang belum memadai di tingkat SKPD, masih terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM dalam pengelolaan data dan informasi.
  - f) Solusi yang ditempuh : Mengikutsertakan seluruh SKPD, Kecamatan dan BPS dalam keterisian data.
  - g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : Baik;
  - h) Hal-hal yang perlu dilaporkan : Tidak ada
- 3) Validasi dan Verifikasi data PBDT tahun 2015
- a) Maksud kegiatan :
    - (1) Melakukan pemutakhiran data Basis Data Terpadu Tahun 2015 guna akurasi penentuan sasaran / *targetting* program – program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
    - (2) Bahwa sesuai komitmen dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, semua program penanggulangan kemiskinan harus menggunakan *single data* / data tunggal. Data PBDT Tahun 2015 merupakan data yang dipergunakan, sehingga harus selalu ter update.
  - b) Sasaran kegiatan : Kepala Keluarga Rumah Tangga (KRT) dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah sebanyak 117.652 jiwa dengan Anggota Rumah Tangga (ART) sebanyak 457.640 jiwa, yang dikelompokkan menjadi 4 desil.
  - c) Hasil kegiatan : Tidak terealisasi
  - d) Realisasi anggaran : Rp. 0 (0 persen)
  - e) Permasalahan yang dihadapi :
    - (1) Berdasarkan hasil konsultasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Pusat Data dan Informasi

(Pusdatin) Kementerian Sosial diperoleh informasi bahwa pada pertengahan tahun 2016 sedang dirumuskan alat atau tools untuk melakukan Verifikasi dan Validasi BDT Tahun 2015 yang akan segera disosialisasikan, sehingga sebaiknya menunggu *tools* tersebut disosialisasikan.

- (2) Hal ini dimaksudkan karena sistem penetapan sasaran dalam jangka panjang perlu memperhatikan dinamika kemiskinan / status kesejahteraan yang dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga perlu *updating* BDT 2015. Mengingat beberapa kabupaten / kota telah melakukan pemutakhiran mandiri dari BDT 2015, namun dengan menggunakan metodologi dan alat / *tools* yang berbeda-beda sehingga perlu diseragamkan terutama mengenai prosedur dan metodologinya, sehingga data hasil MPM dapat *reliable* dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Adapun alat/ *tools* Verifikasi dan Validasi dimaksud baru disosialisasikan oleh TNP2K RI kepada 35 kabupaten / kota pada tanggal 22 Desember 2016, dengan nama Metode Pemutakhiran Mandiri (MPM) dengan sistem *On Demand Application* (ODA) sehingga sisa waktu yang ada tidak memungkinkan untuk melakukan Verifikasi dan Validasi data BDT 2015.
- (4) ODA merupakan langkah awal untuk melakukan pemutakhiran informasi rumah tangga dan individu dalam skala kecil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan pada tahun 2016 baru dilakukan uji coba. Adapun uji coba di Jawa Tengah dilakukan di 1 (satu) kabupaten yakni Kabupaten Sragen.
- (5) Solusi yang ditempuh : Perlunya pelaksanaan kegiatan dimaksud pada tahun anggaran mendatang
- (6) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan : -
- (7) Hal-hal yang perlu dilaporkan : -

## 6. Program Penataan dan Pengendalian Ruang Daerah.

Program penataan dan pengendalian ruang daerah terdiri dari 8 kegiatan antara lain:

- 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah
  - a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya rapat-rapat koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Purbalingga dalam mendukung kegiatan perencanaan tata ruang serta pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  - b) Hasil kegiatan adalah diterbitkannya 104 surat rekomendasi tata ruang oleh BKPRD Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 68 surat rekomendasi sesuai dengan tata ruang dan 36 surat rekomendasi tidak sesuai serta 51 jawaban tentang informasi tata ruang.

- c) Sasarannya adalah terlayannya masyarakat dalam mendapatkan informasi tata ruang dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031.
  - d) Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- realisasi Rp. 41.032.453,- (68,39%).
  - e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
  - f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
  - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- 2) Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga
- a) Maksud pelaksanaan Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai salah satu tahapan dalam proses Peninjauan Kembali Perda No. 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Purbalingga; Pelaksanaan kegiatan berdasarkan pada (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah
  - b) Hasil kegiatan adalah (1) Dokumen Materi teknis Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga; (2) Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Review RTRW Kabupaten Purbalingga
  - c) Sasaran Kegiatan: Mengkaji struktur ruang dan pola ruang serta pemanfaatannya yang memiliki pengaruh dan potensi strategis dalam pembangunan Kabupaten Purbalingga
  - d) Anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 realisasi Rp. 345.431.048,00 (98,69 %).
  - e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
  - f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
  - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada
- 3) Fasilitasi P3KP, Eco Distrik dan Komunitas Hijau
- a) Maksud program dan kegiatan Fasilitasi P3KP, Eco Distrik dan Komunitas Hijau yaitu Memfasilitasi kegiatan dari pusat yang diimplementasikan di Kabupaten/Kota
  - b) Hasil kegiatan adalah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Eco District, P3KP dan Kota Hijau.
  - c) Sasarannya adalah Pemerintah, masyarakat pegiat lingkungan dan komunitas peduli lingkungan
  - d) Anggaran sebesar Rp. 155.000.000,- realisasi Rp. 131.654.322,- (15,6 %).
  - e) Permasalahan yang dihadapi adalah Tahun 2016 tidak ada kegiatan dari pusat yang dapat dilaksanakan oleh Pegiat Lingkungan sehingga penyerapan anggaran hanya ±15%.



- f) Solusi yang ditempuh adalah Koordinasi dengan Kementrian yang membidangi.
  - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan adalah Program P3KP, Eco Distrik dan Komunitas Hijau merupakan program berkelanjutan sampai dengan tahun 2018 sehingga dukungan kegiatan dan dana dari Pemerintah Daerah harus ada.
- 4) Peninjauan Kembali Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kab.Purbalingga Tahun 2011-2031
- a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu Peninjauan Kembali Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kab.Purbalingga dengan maksud : (1) Melaksanakan tahapan proses peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Purbalingga; (2) Untuk menyiapkan bahan dalam pengambilan keputusan pada proses peninjauan kembali RTRW Kabupaten Purbalingga
  - b) Hasil kegiatan adalah Dokumen Materi teknis hasil evaluasi terhadap RTRW Kabupaten Purbalingga
  - c) Sasarannya adalah Rekomendasi tentang RTRW perlu atau tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTRW
  - d) Anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- realisasi Rp. 67.251.500,- (89,67 %).
  - e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
  - f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
  - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- 5) Penyusunan DED Pelebaran Jalan Onje dan Jalan Jambukarang
- a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu Penyusunan DED pelebaran jalan Onje dan Jalan Jambukarang dalam rangka penataan wajah kota Purbalingga sebagai daya tarik kota sebagai pusat jasa.
  - b) Hasil kegiatan adalah Dokumen DED pelebaran jalan Onje dan Jalan Jambukarang
  - c) Sasarannya adalah peningkatan kapasitas jalan Onje dan Jalan Jambukarang dapat berjalan dengan baik.
  - d) Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 47.525.000,- (95,05 %).
  - e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
  - f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
  - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- 6) Penyusunan DED Alun-alun Purbalingga
- a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu Penyusunan DED Alun-alun Purbalingga dalam rangka penataan wajah kota Purbalingga sebagai daya tarik kota sebagai pusat jasa dan sekaligus memiliki fungsi ruang terbuka hijau.
  - b) Hasil kegiatan adalah dokumen DED Alun-alun Purbalingga
  - c) Sasarannya adalah meningkatkan fungsi ruang terbuka hijau dan fungsi sosial ekonomi kota

- d) Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 47.442.500,- (94,89 %).
  - e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
  - f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
  - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
- 7) Penyusunan Tapak Wisata Panusupan
- a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu penyusunan tapak wisata panusupan dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pengembangan desa wisatapanusupan lebih tertata dan terencana.
  - b) Hasil kegiatan adalah dokumen Tapak Wisata Panusupan
  - c) Sasarannya adalah tersedianya panduan dalam penataan desa wisata panusupan
  - d) Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 49.503.500,- (90,01 %).
  - e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
  - f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
  - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada
- 8) Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa Serang
- a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu penyusunan rencana tata ruang desa Serang dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pengembangan desa wisataserang lebih tertata dan terencana.
  - b) Hasil kegiatan adalah dokumen Rencana Tata Ruang Desa Serang
  - c) Sasarannya adalah tersedianya panduan dalam penataan desa wisata serang
  - d) Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 49.574.500,- (99,15 %).
  - e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
  - f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
  - g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada

### BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Tujuan Renja SKPD

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditugaskan dibidang perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah (*think tank*), pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan merupakan implementasi visi Pemerintah Daerah. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah

1. Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel yang ditandai dengan membaiknya nilai AKIP komponen perencanaan dari CC ke B
2. Mewujudkan Kapasitas Lembaga Kelitbangan Daerah yang berkualitas yang ditandai dengan Inventor purbalingga masuk dalam nominator Krenova tingkat Provinsi.

#### 3.2 Sasaran Renja SKPD

Sasaran dan kegiatan tahunan yang ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan kondisi terkini terutama untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah atau instansi/lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2018, meliputi :

Sasaran pertama dalam rangka mewujudkan tujuan pertama adalah Meningkatnya kualitas perencanaan dengan indikator kinerjanya dalah Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah dengan target sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI (2016)	Target	
				2018	2019
Meningkatnya kualitas perencanaan	Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah	persen	94	97	98

Sasaran kedua dalam rangka mewujudkan tujuan kedua adalah Meningkatnya kualitas kelitbangan, dengan indikator kinerja Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah, dengan target sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI (2015)	Target	
				2018	2019
Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	persen	-	50	55

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan kegiatan pada tahun 2018 terlihat pada tabel dibawah ini.

**Indikasi Program dan Kegiatan Tahun 2018 disertai dengan Pagu Indikatif Tahun 2018**  
**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting
		Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	
I. Fungsi Penunjang A. Bidang Perencanaan						
<b>Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah</b>				<b>1.128.945.000</b>		
1 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Tersedianya daya listrik		182.400 Kwh	330.808.000		
	Tesedianya Air PAM		528 M3			
	Tersedianya koneksi internet		1,2 megabyte			
	Tersedianya jasa telpon		3 sambungan			
	Tersedianya bahan kantor		1 tahun			
2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya kunjungan lapangan/survey		324 OH	277.910.000		
	Terlaksananya koordinasi/kunjungan/undangan tingkat regional		41 OH			
	Terlaksannnya Koordinasi/kunjungan/konsultasi/ undangan Jateng/DIY		175 OH			
	Terlaksannnya Koordinasi/kunjungan/konsultasi/ undangan Jakarta dan Kabupaten/kota diluar Jateng/DIY		59 OH			
	Terlaksananya Undangan di luar Jawa		14 OH			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting
		Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		30 Unit Roda dua, 6 unit roda 4, 6 mesin ketik, 25 pc, 15 laptop, 15 printer, 1 genset, 17 AC dan jaringan telpon dan internet	290.227.000		
		Terpeliharanya taman bappeda dan Gedung Kantor		2.090 m2		
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarpras kantor		6 LCD, 5 printer, 2 pengadaan pintu gerbang	100.000.000	
5	Penataan Arsip	Tertatanya arsip keuangan		40 box	20.000.000	
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Terkirimnya SDM dalam pelatihan teknis		25 ohk	20.000.000	
7	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Perencana	Dokumen perencanaan		1 dokumen	40.000.000	
		Dokumen Evaluasi		3 dokumen		
8	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pertanggungjawaban PD	terlaksananya peningkatan kompetensi		4 tema/40 personil	50.000.000	
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>1.493.857.000</b>	
9	Penyelenggaraan Musrenbang	Terlaksananya Pramusrenbang, Musrebangkab, Prov dan Nas		4 forum	70.000.000	
10	Penyusunan RKPD	Tersusunnya dokumen RKPD tahun 2019		1 dokumen ( 200 Ranwal, 300 Ranmusren, 50 dokumen akhir)	200.000.000	
11	Penyusunan RKPD Perubahan	Tersusunnya dokumen RKPD tahun 2018 Perubahan		1 dokumen ( 200 Ranwal, 50 dokumen akhir)	120.000.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	
12	Pemeliharaan SIMRENDA	Terimputnya data perencanaan		4 tahap (musrenbangcam, musrenbangkab, rkpd, ppas)	50.000.000		
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Rumpun Ekonomi			40 rakor/workshop, 606 kali monev. 44 ok ke wil I, 44 ok ke wil II, 16 ok ke wil III, 64 ok ke wil IV, 32 ok ke wil V dan 64 kali ke wilayah VI	323.357.000		
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Rumpun IPW			25 rakor 8 rumpun, 114 kali monev 5 rumpun/tema. 27 kali dinas luar 6 rumpun/tema	125.000.000		
15	Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Rumpun PK	Terlaksananya FGD Bidang Pemerintahan & Kesra		40 rakor 8 rumpun, 137 kali monev 5 rumpun/tema. 25 kali dinas luar 6 rumpun/tema	207.500.000		
16	Penyusunan KUA PPAS	Tersusunnya dokumen KUA & PPAS		2 dokumen	99.000.000		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting
		Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	
17	Penyusunan KUA PPAS Perubahan	Tersusunnya dokumen KUA & PPAS Perubahan		2 dokumen	99.000.000	
18	Kajian Penataan Pengembangan Koridor utara dampak exit Tol Pemalang	Tersusunnya dokumen kajian ruang		1 dokumen	200.000.000	
19	Kajian Penataan Pengembangan Koridor Selatan dampak exit Tol Pemalang & LANUD Wirasaba	Tersusunnya dokumen kajian ruang		1 dokumen	200.000.000	
	<b>Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>624.780.000</b>	
20	Fasilitasi Kegiatan TP, DAK dan Bangub	Tersedianya prioritas usulan kegiatan TP, DAK, Bangub, Sektoral		4 dokumen	79.725.000	
		Tersusunnya laporan konsolidasi kegiatan TP, DAK, Bangub		5 dokumen		
		Pendokumentasian hasil perencanaan Pembangunan		1 dokumen		
21	Evaluasi RKPD	Tersusunnya laporan evaluasi RKPD		4 dokumen	80.055.000	
22	Penyusunan Analisis Makro Ekonomi Daerah (PDRB IHK NTP)	Tersedianya PDRB, IHK dan NTP		4 dokumen (PDRD Penerimaan, PDRB Pengeluaran, IHK, NTP)	85.000.000	
21	Analisis Hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA)	Tersusunnya Hasil SUSEDA		1 dokumen (10 buku)	70.000.000	
22	Penanggulangan Kemiskinan / Nangkis (Ban-Gub)	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)		1 dokumen (5 buku)	150.000.000	
		Rakor TKPKD dan Rakornis		2 & 10 kali		
		Study Caomparatif Program Nangkis		1 kali		
23	FEDEP (BANGUB)	Terfasilitasinya klaster UMKM		13 klaster	160.000.000	
		Pameran Produk Unggulan Daerah		4 kali		
		Workshop/FGD Potensi Unggulan Daerah		2 kali		



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting
		Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	
<b>B</b>	<b>Bidang Penelitian dan Pengembangan</b>					
	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</b>			<b>1.610.000.000</b>		
24	Fasilitasi KKN	Terfasilitasinya pelaksanaan KKN		175.000.000		
25	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terfasilitasinya kelitbang		500 Peneributan ijin penelitian, 1 pameran krenova, 6 deseminasi, 6 penghargaan lomba inovasi masyarakat, 6 fasilitasi penelitian, 1 fsilitasi lomba tik provinsi	150.000.000	
26	Peningkatan SDM Litbang dalam Metodologi Penelitan	Maningkatnya kualiat pembina/pelaku karya ilmiah		100 SDM Litbang/Pembina KIR	50.000.000	
28	Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional (PIRN)	Keikutsertaan PIRN		600 pesrta / 7 hari dan ... Rekomendasi pengembangan potda	1.235.000.000	
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>4.957.582.000</b>	

#### BAB IV. PENUTUP


Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan suatu bentuk tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi perubahan dimana dalam perencanaan dan penyusunannya memerlukan pengamatan yang tepat dan akurat, serta penilaian dan antisipasi yang efektif. Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan bukan hanya diukur dari tingkat pencapaian *output* dibandingkan dengan *input* yang digunakan, tetapi lebih dari itu diukur juga dari sejauh mana pencapaian *outcome* dan *benefit* serta dampak dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga sangat ditentukan oleh kapabilitas dan integritas sumber daya manusia yang berinovasi tinggi dalam mewujudkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal. Dalam mencapai kinerja tersebut harus di dukung oleh prasarana dan sarana yang cukup dan sumber daya manusia aparatur yang profesional. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 diharapkan dapat bermanfaat dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi, serta dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi dan kinerja organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan dukungan dari semua pihak yang terkait, khususnya segenap pegawai/personil yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga, karena Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga akan dapat dicapai dengan baik apabila didukung oleh semangat, dedikasi, integritas dan upaya maksimal dari seluruh personil yang ada.

Selanjutnya dokumen perencanaan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 sebagai tahapan pencapaian visi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam membangun Kabupaten Purbalingga untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga

  
KUSMARTADHI S.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650315 199103 1 013